

20
25

RENCANA KERJA

Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi
Manajemen ASN

Badan Kepegawaian Negara



RENCANA KERJA
DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI DAN DIGITALISASI
MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

2025

Daftar Isi

RENCANA KERJA	1
Daftar Isi.....	2
BAB I. PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	5
B. Landasan Hukum	5
C. Ruang Lingkup	7
D. Maksud dan Tujuan	7
BAB II	8
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2024	8
A. Tujuan.....	8
B. Sasaran Strategis.....	8
C. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	10
IKU 1. Indeks Kepuasan Instansi Terhadap Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	10
IKU 2. Indeks Kepuasan Pengguna atas Layanan Data dan Informasi ASN	11
IKU 3. Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN	12
IKU 4. Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN	13
IKU 5. Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN	14
IKU.6 Persentase Integrasi SIASN	15
IKU.7 Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian ASN	19
IKU.8 Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK	20
IKU.9 Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Monitor dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputy Bidang SINKA	21
IKU.10 Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang SINKA	22
IKU.11 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Terstandar	23
IKU.13 Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputy Bidang SINKA	24
IKU.14 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Deputy Bidang SINKA	25
IKU.15 Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan BPK/Inspektorat	25
BAB III.....	26
RENCANA KERJA 2025.....	26
A. Kebijakan Nasional.....	26
B. Program Prioritas Nasional 2024.....	27
C. Indikator dan Target Kinerja.....	27
D. Rencana Anggaran.....	34
BAB IV. PENUTUP	35

Daftar Tabel

Tabel 1 Realisasi Indeks Kepuasan Instansi Terhadap Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	10
Tabel 2 Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna atas Layanan Data dan Informasi ASN	11
Tabel 3 Realisasi Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN	12
Tabel 4 Realisasi Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN	13
Tabel 5 Realisasi Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN	14
Tabel 6 Realisasi Persentase Integrasi SIASN	15
Tabel 7 Data Instansi Terintegrasi SIASN untuk riwayat Jabatan melalui WS Tahun 2024	16
Tabel 8 Data Instansi Terintegrasi SIASN untuk riwayat Jabatan melalui Simpegnas Tahun 2024	17
Tabel 9 Realisasi Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian ASN	19
Tabel 10 Realisasi Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK	20
Tabel 11 Realisasi Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Monitor dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputy Bidang SINKA	21
Tabel 12 Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang SINKA	22
Tabel 13 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Terstandar	23
Tabel 14 Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang SINKA	23
Tabel 15 Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang SINKA	24
Tabel 16 Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Deputy Bidang SINKA	25
Tabel 17 Realisasi Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan BPK/Inspektorat	25
Tabel 18 Target Tingkat Interoperabilitas Sistem Informasi ASN	27
Tabel 19 Target Persentase Pemanfaatan Data Kepegawaian untuk Pengambilan Keputusan	28
Tabel 20 Target Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK yang Aman dan Handal	29
Tabel 21 Realisasi Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital	30
Tabel 22 Target Skor Evaluasi AKIP di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	31
Tabel 23 Target Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	31
Tabel 24 Target Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	32
Tabel 25 Target Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	33

Daftar Gambar

Gambar 1 Peta Strategi Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN.....	9
Gambar 2 Sasaran Pembangunan Tahun 2025	26

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan program transformasi digital secara menyeluruh untuk berbagai proses bisnis internal dan pelayanan kepada ASN maupun instansi pemerintah, pada tahun anggaran 2025 Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan BKN Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN, RPJMN 2025 - 2029, Renstra Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN 2025 - 2029, dan RKP 2025. Rencana Kerja ditetapkan pada tahun perencanaan yang selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Selain itu dalam penyusunan Renja Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Tahun 2025 ditetapkan sasaran, indikator kinerja serta target kinerja yang merupakan komitmen bagi Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN yang harus tercapai dalam satu periode tahunan

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025
12. PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
18. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;
19. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

C. Ruang Lingkup

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian seperti yang tertuang dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.29 Tahun 2020 sebagai berikut:

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian bertugas untuk melakukan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian;
- c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidangnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

D. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan Direktorat di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN serta untuk menjaga kesinambungan Renstra Deputi SINKA 2025-2029. Selain itu tujuan penyusunan Rencana Kerja Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Petunjuk dalam menjalankan program kegiatan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN selama tahun 2025;
2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN tahun 2025;
3. Sebagai kendala dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian Deputi SINKA tahun 2025

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2024

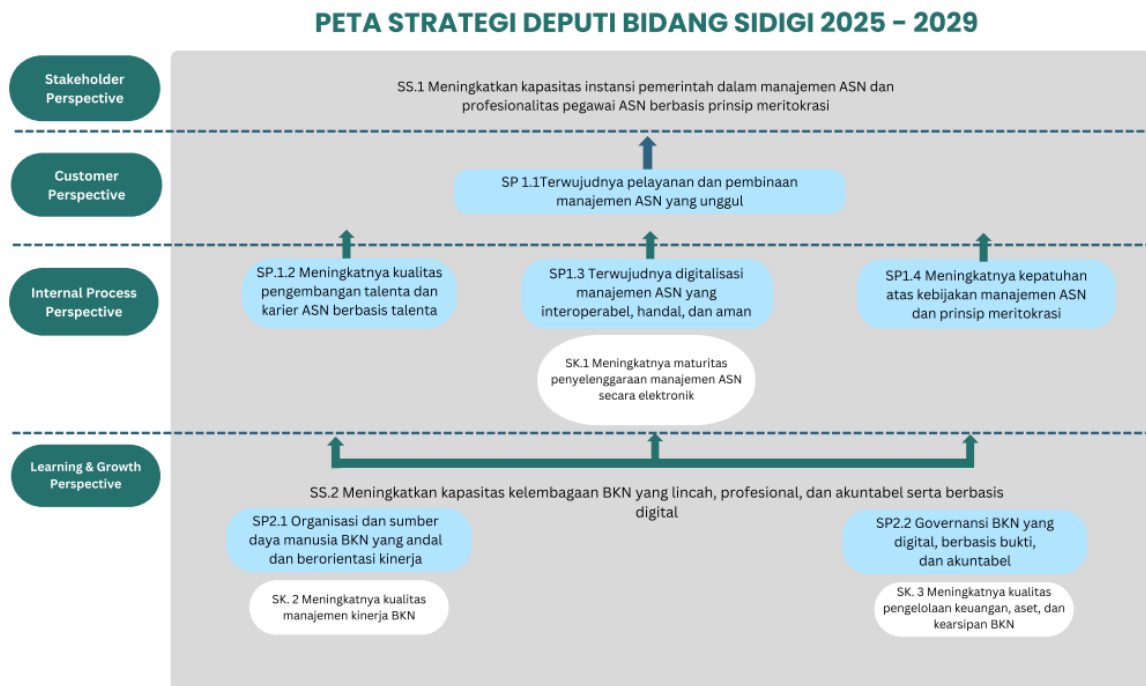
A. Tujuan

Sesuai dengan rencana strategis Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Tahun 2025 – 2029 adalah melaksanakan *Internal Process Perspective* Badan Kepegawaian Negara SP1.3 yaitu: “Terwujudnya digitalisasi manajemen ASN yang interoperabel, handal, dan aman”. Sasaran strategis tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan.

B. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Deputy Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan. Penyusunan sasaran strategis Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yakni *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

PETA STRATEGI DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI DAN DIGITALISASI MANAJEMEN



Gambar 1 Peta Strategi Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

INTERNAL PERSPECTIVE

- 1) Sasaran program satu yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya digitalisasi manajemen ASN yang interoperabel, handal, dan aman”, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Tingkat Interoperabilitas Sistem Informasi ASN;
 - b. Persentase Pemanfaatan Data Kepegawaian untuk Pengambilan Keputusan;
 - c. Persentase tingkat ketersediaan infrastruktur TIK yang aman dan handal;
 - d. Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital.

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE

- 2) Sasaran program dua yang ingin dicapai adalah “Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja”, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Skor Evaluasi AKIP di lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN;
 - b. Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN
- 3) Sasaran program tiga yang ingin dicapai adalah “Governansi BKN yang Digital, Berbasis Bukti dan Akuntabel”, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN
- b. Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

C. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

IKU 1. Indeks Kepuasan Instansi Terhadap Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi ASN

Tabel 1 Realisasi Indeks Kepuasan Instansi Terhadap Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi ASN

Target		Realisasi	
2023	2024	2023	2024
88	95	88,94	95,56

Indikator ini mengukur tingkat kepuasan instansi pusat dan daerah dalam pemberian dukungan pembinaan sistem informasi ASN yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif. Capaian indikator ini diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 yang dilakukan oleh 3 (tiga) Direktorat, yaitu Direktorat PPSIASN, Direktorat PDPIK, dan Direktorat Arsip Kepegawaian.

Pada tahun 2023 realisasi IKU.1 ini sebesar 88,94 sudah diatas target tahun 2023 yaitu sebesar 88. Realisasi ini diperoleh dari hasil rata-rata realisasi ketiga Direktorat, yaitu Direktorat PPSIASN, Direktorat PDPIK, dan Direktorat AK.

Pada tahun 2024 terjadi kenaikan target IKU.1 menjadi 95 dan realisasi pada tahun 2024 ini sebesar 95,56 sudah di atas target tahunan. Pada periode 2024, upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut adalah pengumpulan respon diperluas tidak hanya dengan menyebarkan surat, melainkan dengan memberikan survei setiap memberikan layanan pembinaan pengelolaan data kepada instansi.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN adalah terus berkelanjutan dalam pemberian dukungan pembinaan sistem informasi ASN kepada instansi pusat dan daerah. Pada periode Rencana Strategis tahun 2025-2029, indikator kinerja ini tidak dilanjutkan.

IKU 2. Indeks Kepuasan Pengguna atas Layanan Data dan Informasi ASN*Tabel 2 Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna atas Layanan Data dan Informasi ASN*

Target		Realisasi	
2023	2024	2023	2024
88	95	88,15	95,56

Indikator ini mengukur tingkat kepuasan instansi pusat dan daerah dalam pemberian layanan yang berkaitan dengan sistem informasi ASN, pengelolaan data dan penyajian informasi kepegawaian, informasi arsip kepegawaian ASN serta infrastruktur teknologi informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif. Capaian indikator ini diperoleh dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 yang dilakukan oleh semua Direktorat di Deputi SINKA.

Pada tahun 2023 realisasi IKU.2 ini sebesar 88,15 sudah diatas target tahun 2023 yaitu sebesar 88. Realisasi diperoleh dari hasil rata-rata realisasi empat Direktorat, yaitu Direktorat PPSIASN, Direktorat PDPIK, Direktorat AK, dan Direktorat INTI.

Pada tahun 2024 terjadi kenaikan target IKU.2 ini menjadi 95 dan realisasi pada tahun 2024 ini sebesar 95,56 sudah di atas target tahunan. Pada periode 2024, upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut adalah pengumpulan respon diperluas tidak hanya dengan menyebarkan surat, melainkan dengan memberikan survei setiap memberikan layanan pembinaan pengelolaan data kepada instansi.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN adalah terus berkelanjutan dalam pemberian dukungan pembinaan sistem informasi ASN kepada instansi pusat dan daerah. Pada periode Rencana Strategis tahun 2025-2029, indikator kinerja ini tidak dilanjutkan.

IKU 3. Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN*Tabel 3 Realisasi Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN*

Target		Realisasi	
2023	2024	2023	2024
100%	100%	98%	97,5%

Indikator ini mengukur tersusunnya naskah rumusan regulasi teknis tata kelola TIK ASN. Indikator ini merupakan kelanjutan pada tahun 2021, yaitu penyusunan kelanjutan draft pemenuhan regulasi teknis tata kelola TIKASN yang sudah dilakukan review oleh Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama (BHHK).

Pada tahun 2023 realisasi IKU.3 sebesar 98%. Capaian pada tahun 2023 ini tidak mencapai 100% dikarenakan Surat Edaran BKN tentang Arsip Kepegawaian masih berupa rancangan dalam tahap penyempurnaan dan pembahasan internal.

Pada tahun 2024 realisasi IKU.3 ini sebesar 97,5% juga tidak mencapai target tahunan 100%. Terdapat penurunan realisasi dari tahun 2023 sebesar 0,5%. Hal ini dikarenakan realisasi dari Direktorat AK sebesar 90% sama seperti pada tahun 2023. Surat Edaran BKN masih berupa rancangan dalam tahap penyempurnaan dan pembahasan internal. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya peraturan yang lebih tinggi sebagai dasar turunan penyusunan SE.

Tindak lanjut yang dilakukan adalah mengajukan permohonan rancangan revisi Peraturan BKN Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip melalui Nota Dinas Nomor 33/AR.01/ND/E.I/2024 tanggal 02 April 2024 dan rancangan revisi Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis melalui Nota Dinas Nomor 34/AR.01/ND/E.I/2024 tanggal 02 April 2024 ke Biro Umum sebagai dasar turunan penyusunan SE. Pada periode Rencana Strategis tahun 2025-2029, indikator kinerja ini tidak dilanjutkan karena sudah selesai pada periode Rencana Strategis 2020-2024.

IKU 4. Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN*Tabel 4 Realisasi Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN*

Target		Realisasi	
2023	2024	2023	2024
97%	100%	98,76%	100%

Peningkatan kualitas data ASN adalah upaya pengelolaan data dalam rangka penyediaan data dan informasi kepegawaian ASN pada instansi pemerintah (K/L/D/stakeholder) yang valid dan termuktahir melalui kegiatan-kegiatan seperti:

- Layanan Data Seleksi CASN (CPNS, PPPK, Sekolah Kedinasan) dan Penataan Non ASN
- Pengukuran Kualitas Data dan Penyelesaian Disparitas Data
- Produksi Publikasi Sajian Data
- Perencanaan Kebutuhan ASN
- Pengelolaan Tabel Referensi
- Kerjasama Pemanfaatan Data
- Sinkronisasi dan Pengelolaan Database
- Dukungan Data Pemindahan IKN dan Pengalihan ASN
- Penanganan Aduan Permasalahan Data
- Dukungan Pengembangan Aplikasi

Pada tahun 2023 realisasi IKU.4 ini sebesar 98,76% sudah melebihi target tahunan sebesar 97%.

Pada tahun 2024 realisasi IKU.4 sebesar 100% sesuai dengan target tahunan. Tercapainya target IKU.4 pada tahun 2024 ini didukung oleh Koordinasi yang efektif baik masing-masing Tim Pokja maupun antar Tim Pokja.

Tindak lanjut yang akan dilakukan di tahun berikutnya adalah penilaian tingkat kualitas data pada Instansi Pemerintah. Pada periode Rencana Strategis tahun 2025-2029, IKU ini tidak dilanjutkan dan diganti oleh Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat minimal Tinggi pada Direktorat PDPIK.

IKU 5. Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN*Tabel 5 Realisasi Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN*

Target		Realisasi	
2023	2024	2023	2024
100%	100%	86, 33%	99,17%

Indikator ini mengukur pembangunan, pengembangan, dan atau pemeliharaan subsistem SIASN serta pembangunan, pengembangan, dan atau pemeliharaan aplikasi yang terhubung dengan SIASN sehingga mewujudkan proses Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, efektif, efisien dan terintegrasi.

Target IKU.5 tahun 2023 belum dapat secara penuh direalisasikan dan memperoleh capaian kinerja sebesar 86,33%. Capaian tersebut didapat dari perhitungan jumlah realisasi pembangunan, pengembangan dan atau pemeliharaan subsistem SIASN ditambah jumlah realisasi pembangunan, pengembangan dan atau aplikasi yang terhubung dengan SIASN dibandingkan realisasi Pengembangan atau pemeliharaan subsistem SIASN.

Pada tahun 2024 terjadi kenaikan realisasi IKU.5 menjadi 99,17%, namun masih belum mencapai target tahunan sebesar 100%. Beberapa kendala yang dihadapi sepanjang tahun 2024 antara lain:

- Kurangnya pemahaman pimpinan Instansi terkait urgensi digitalisasi MASN, khususnya untuk Instansi yang belum progres
- Terdapat Instansi baru yaitu Badan Karantina Indonesia, dan untuk SIMPEGnya masih proses Pengembangan

Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah melakukan koordinasi perubahan UI dan proses bisnis modul kinerja pada platform digital Manajemen ASN dengan INAGOV. Pada periode Rencana Strategis 2025-2029 IKU ini tidak dilanjutkan.

IKU.6 Persentase Integrasi SIASN*Tabel 6 Realisasi Persentase Integrasi SIASN*

Target		Realisasi	
2023	2024	2023	2024
100%	100%	100%	96,11%

Indikator ini menggambarkan integrasi sistem informasi kepegawaian instansi pemerintah dengan SIASN yang dilakukan melalui *tools web service* secara dua arah ataupun melalui pemanfaatan aplikasi SIMPEGNAS (Sistem Informasi Kepegawaian Nasional) dalam rangka mewujudkan keterhubungan data ASN antara instansi pemerintah dan BKN.

Pada tahun 2023 sebanyak 267 instansi sudah melakukan integrasi SIMPEG nya dengan SIASN melalui Web Service secara 2 (dua) arah sehingga didapatkan peningkatan jumlah instansi yang sudah terintegrasi menjadi 626 instansi atau sama dengan 100%. Sepanjang tahun 2024 BKN terus berupaya meningkatkan kualitas integrasi dengan meninjau keterhubungan sistem informasi kepegawaian (Simpeg) instansi dengan SIASN untuk riwayat Jabatan. Pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 100% instansi telah memiliki Simpeg yang terhubung dengan SIASN pada riwayat tersebut. Sementara untuk instansi yang menggunakan Aplikasi Simpegnas kualitas integrasi akan ditinjau melalui pemanfaatan layanan Jabatan sehingga database instansi akan terhubung ke SIASN.

Pada tahun 2024 realisasi IKU.6 ini masih belum mencapai target yaitu sebesar 96,11% dengan rincian 293 dari 294 instansi telah terintegrasi dengan SIASN melalui web service untuk riwayat Jabatan. Sementara itu, tercatat 311 dari 336 Riwayat Jabatan instansi telah terhubung dengan SIASN melalui pemanfaatan Aplikasi Simpegnas. Rincian realisasi Indikator ini pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Data Instansi Terintegrasi SIASN untuk riwayat Jabatan melalui WS Tahun 2024

Wilayah		Terintegrasi Riwayat Jabatan Melalui WS	Total Instansi memilih integrasi melalui WS	Persentase Realisasi melalui Web Service
1	BKN Pusat	45	46	97,83%
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	41	41	100%
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	38	38	100%
4	Kantor Regional III BKN Bandung	37	37	100%
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	21	21	100%
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	10	10	100%
7	Kantor Regional VI BKN Medan	8	8	100%
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	17	17	100%
9	Kantor Regional VIII Banjarmasin	24	24	100%
10	Kantor Regional IX Jayapura	4	4	100%
11	Kantor Regional X Denpasar	11	11	100%
12	Kantor Regional XI Manado	14	14	100%
13	Kantor Regional XII Pekanbaru	18	18	100%
14	Kantor Regional XIII Aceh	5	5	100%
15	Kantor Regional XIV Manokwari	0	0	-
TOTAL		293 instansi	294 instansi	99,66%

Adapun tabel tersebut di atas menunjukkan data instansi yang sudah terintegrasi dengan SIASN pada riwayat Jabatan melalui metode *Web Service* pada setiap wilayah

kerja tahun 2024 dengan perolehan realisasi sebanyak 293 instansi. Sementara realisasi integrasi melalui pemanfaatan Aplikasi Simpegnas Integrasi terealisasi sebesar 92,56% (311 dari 336 instansi) s.d. akhir tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8 Data Instansi Terintegrasi SIASN untuk riwayat Jabatan melalui Simpegnas Tahun 2024

Wilayah		Terintegrasi Riwayat Jabatan Melalui Simpegnas	Total Instansi memilih integrasi melalui Simpegnas	Persentase Realisasi melalui Simpegnas
1	BKN Pusat	34	38	89,47%
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	1	1	100%
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	1	1	100%
4	Kantor Regional III BKN Bandung	0	0	-
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	55	55	100%
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	21	22	95,45%
7	Kantor Regional VI BKN Medan	25	26	96,15%
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	32	32	100%
9	Kantor Regional VIII Banjarmasin	22	22	100%
10	Kantor Regional IX Jayapura	10	29	34,48%
11	Kantor Regional X Denpasar	33	33	100%
12	Kantor Regional XI Manado	20	20	100%
13	Kantor Regional XII Pekanbaru	23	23	100%
14	Kantor Regional XIII Aceh	19	19	100%

15	Kantor Regional XIV Manokwari	15	15	100%
TOTAL		293 instansi	294 instansi	92,56%

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 diantaranya dengan melakukan evaluasi dan pendampingan secara berkala kepada instansi pusat dan daerah. Evaluasi dilakukan untuk memonitor instansi dalam proses integrasi SIMPEG maupun dalam pemanfaatan aplikasi SIMPEGNAS untuk riwayat Jabatan. Integrasi dengan menggunakan tools web service didorong melalui kegiatan pendampingan agar setiap Admin dapat segera melakukan subscribe ke APIM Web Service untuk riwayat Jabatan. Selain itu, dilakukan pemantauan melalui zoom dan pengiriman video demo yang menunjukkan instansi sudah melakukan proses integrasi dua arah untuk riwayat Jabatan. Badan Kepegawaian negara juga melakukan kolaborasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong percepatan integrasi SIASN dan telah dilaksanakan rapat pemantauan dan evaluasi terkait hal ini dengan KPK.

Beberapa kendala yang terjadi pada periode 2024 ini antara lain:

1. Adanya penambahan instansi baru dengan kondisi SIMPEG yang masih dikembangkan, sehingga belum siap untuk dilakukan integrasi;
2. Kurangnya perhatian pimpinan instansi terkait urgensi digitalisasi MASN, khususnya untuk Instansi yang belum progres;
3. Terbatasnya kompetensi maupun jumlah Sumber Daya Manusia instansi dalam bidang IT untuk mengoperasikan API Service;
4. Perbedaan struktur database antara SIMPEG instansi dan SIASN;
5. Adanya ketergantungan instansi terhadap tim pengembang SIMPEG dari Diskominfo ataupun pihak ketiga, karena pelimpahan sistem kepegawaian instansi, sehingga tim IT instansi kesulitan untuk memahami *coding* atas sistem kepegawaian instansi; dan
6. Aplikasi Simpegnas sulit diimplementasikan ketika belum adanya dorongan dari dalam instansi itu sendiri.

Tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

- Penguatan regulasi integrasi SIASN dalam platform digital (RPP MASN)
 - Penguatan komitmen pimpinan untuk memaksimalkan integrasi (melalui program stranas PK KPK dan RPJMN MASN 2025 - 2029)
 - Penggunaan data profile ASN untuk penggajian baik di pusat maupun daerah
- Pada periode Rencana Strategis 2025-2029 IKU ini dilanjutkan dengan Tingkat Interoperabilitas Sistem Informasi ASN.

IKU.7 Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian ASN

Tabel 9 Realisasi Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian ASN

Target		Realisasi	
2023	2024	2023	2024
93%	100%	95,63%	100,06%

Digitalisasi arsip kepegawaian adalah seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penciptaan, penggunaan, pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, penyusutan dan pemanfaatan arsip kepegawaian. Kegiatan digitalisasi arsip kepegawaian terdiri dari alih media dokumen kepegawaian (Pra Scan, scan, verifikasi dan validasi) dan pengelolaan dan pemeliharaan arsip kepegawaian fisik (reposisi tata naskah, perlabelan dan penggantian sampul rusak, retensi tata naskah dan penginputan serta penginputan dan penempelan RFID).

Pada tahun 2023 realisasi IKU.7 sebesar 95,63% (3.215.439 dokumen) sudah melampaui target tahun 2023 sebesar 93%. Terlepas dari capaian target tersebut, masih ditemui kendala dalam pelaksanaan kegiatan digitalisasi arsip kepegawaian antara lain keterbatasan jumlah SDM pada Direktorat Arsip Kepegawaian dan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan alih media dan penyalinan dokumen Kepegawaian.

Pada tahun 2024 realisasi telah melebihi target tahunan yaitu sebesar 3.364.217 dokumen atau 100,06% dari target yang ditetapkan sebesar 3.362.105 dokumen atau 100%. Realisasi tersebut merupakan akumulasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tindak lanjut yang akan dilakukan selanjutnya adalah identifikasi kelengkapan dokumen kepegawaian pada aplikasi DMS versi 3 (hasil pengembangan aplikasi DMS versi 2) sesuai dengan kategori tersedia dan lengkap dengan tujuan menjaga konsistensi validasi dokumen kepegawaian digital dengan data kepegawaian digital dan dalam rangka menyajikan informasi dokumen kepegawaian digital yang autentik. Pada periode Rencana Strategis tahun 2025-2029 IKU ini menjadi Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Non Digital dan Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital

IKU.8 Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK

Tabel 10 Realisasi Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK

Target		Realisasi	
2023	2024	2023	2024
99%	99%	99,99%	99,99%

Pemenuhan kebutuhan infrastruktur teknologi informasi melalui layanan Direktorat INTI yang terdiri dari layanan pusat komputasi, layanan informasi dan komunikasi (layanan email, kolaborasi drive, konferensi video), dan layanan keamanan TI.

Pada tahun 2023 realisasi IKU.8 sebesar 99,99% sesuai target yang diperoleh dari realisasi layanan pusat komputasi, layanan informasi dan komunikasi, dan layanan keamanan TI. Durasi sistem pada pusat data BKN dapat diakses selama 525.047 menit dari yang seharusnya 525.600 menit atau sebesar 99,89%. Pada tahun 2024 realisasi IKU.8 sebesar 99,99% yang diperoleh dari realisasi layanan pusat komputasi, layanan informasi dan komunikasi, dan layanan keamanan TI. Durasi sistem pada pusat data BKN dapat diakses selama 525.590 menit dari yang seharusnya 525.600 menit atau sebesar 99,99%. Terlepas dari capaian target tersebut, masih ditemui kendala dalam pelaksanaan layanan tersebut antara lain:

- Belum adanya sistem manajemen layanan pengujian Keamanan TI, Layanan Pengendalian Akses, Layanan Pengelolaan Insiden Keamanan. Saat ini permintaan maupun pengaduan melalui email : dit.inti@bkn.go.id;
- Keterbatasan jumlah SDM pengelola keamanan informasi

Tindak lanjut yang akan dilakukan selanjutnya antara lain:

- Sosialisasi dan pembinaan khususnya untuk layanan email dan loker termasuk penambahan kapasitas email dan loker;
- Peningkatan kompetensi di bidang keamanan informasi untuk SDM pada Direktorat Infrastruktur TI;

Pada periode Rencana Strategis 2025-2029 IKU ini dilanjutkan dengan Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK yang Aman dan Handal.

IKU.9 Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Monitor dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputy Bidang SINKA

Tabel 11 Realisasi Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Monitor dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputy Bidang SINKA

Target		Realisasi	
2023	2024	2023	2024
6 dokumen	100%	6 dokumen	100%

Pada tahun 2023, indikator ini mengalami perubahan nomenklatur yang sebelumnya “Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di lingkungan Deputy Bidang SINKA” menjadi “**Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Monitor dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputy Bidang SINKA**”. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Kementerian PAN RB di dalam Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2022 bahwasanya indikator kinerja dinilai masih berorientasi *output*, sehingga perlu diubah untuk mencerminkan orientasi *outcome* atas sasaran strategis yang dimaksud. Indikator ini mengukur tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan Deputy Bidang SINKA pada tahun sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Pada tahun 2024, realisasi IKU.9 sebesar 100% yang diperoleh dari Direktorat PPSIASN, PDPIK, AK, dan INTI. Indikator ini mengukur tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di masing-masing direktorat di lingkungan Deputy Bidang SINKA. Pada periode Rencana Strategis 2025-2029 IKU ini tidak dilanjutkan.

IKU.10 Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang SINKA*Tabel 12 Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang SINKA*

Target		Realisasi	
2023	2024	2023	2024
80	83	82,62	84,14

Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN BKN di lingkungan Deputy SINKA BKN. Perhitungan IP ini dilakukan secara mandiri dan manual dengan melakukan pengecekan nilai IP masing-masing pegawai di Direktorat di bawah Deputy Bidang SINKA, kemudian dirata-rata. Pengukuran dan perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia BKN.

Pada tahun 2023 hasil IP ASN Deputy Bidang SINKA sebesar 82,62 sudah melampaui target tahunan sebesar 80. Pada tahun 2024 hasil IP ASN Deputy Bidang SINKA sebesar 84,14 sudah melampaui target tahunan sebesar 83 dan meningkat dari tahun sebelumnya. Terlepas dari capaian target tersebut, masih ditemui kendala dalam pelaksanaan layanan tersebut antara lain Belum tersedia diklat fungsional untuk jabatan Statistisi dan diklat Pengawas untuk jabatan Kasub TU.

Tindak lanjut pada tahun berikutnya adalah menyampaikan Nota Dinas kepada Biro SDM untuk dapat merancang diklat fungsional jabatan Statistisi dan diklat pengawas untuk jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha. Pada periode Rencana Strategis 2025-2029 IKU ini tidak dilanjutkan pada Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN.

IKU.11 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Terstandar*Tabel 13 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Terstandar*

Target		Realisasi	
2023	2024	2023	2024
80	83	82,62	84,14

IKU.11 ini menjelaskan penggunaan sistem informasi internal sebagai penunjang pelayanan kepegawaian yang handal dan mudah diakses untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sistem informasi tersebut antara lain:

1. LBP
2. presensi
3. kinerja
4. simpeg
5. CMB
6. Email
7. Loker
8. DS
9. Srikandi
10. Sakti
11. Om Span
12. Emonev
13. Spektra
14. EDMS

Realisasi IKU.11 selalu stabil dari tahun ke tahun dikarenakan semua aplikasi tersebut secara rutin digunakan oleh semua unit kerja di Lingkungan Deputy SINKA.

IKU.12 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang SINKA*Tabel 14 Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang SINKA*

Target		Realisasi	
2023	2024	2023	2024
100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Nomor 216/PR.07.03/ND/A.IV/2023 terdapat perubahan nomenklatur IKU.12 yang awalnya “**Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputy Bidang**

SINKA” menjadi “Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB di Lingkungan Deputy SINKA”.

Pada tahun 2023 realisasi IKU.12 ini dimulai pada TW IV dengan realisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2024 realisasi IKU.12 sebesar 100%. Pengukuran dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara Rencana Aksi yang dilaksanakan oleh masing-masing Direktorat di lingkungan Deputy Bidang SINKA dengan Rencana Aksi yang ditargetkan.

Tindak lanjut pada tahun berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan rencana aksi yang telah disusun oleh semua Direktorat di Lingkungan Deputy Bidang SINKA. Pada periode Rencana Strategis tahun 2025-2029 IKU ini dilanjutkan dengan Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN.

IKU.13 Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputy Bidang SINKA

Tabel 15 Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang SINKA

Target		Realisasi	
2023	2024	2023	2024
81	85	67,45	67,85

Indikator ini merupakan nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh inspektorat terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja di lingkungan Deputy Bidang SINKA. Berdasarkan penilaian LHE Deputy Bidang SINKA pada tahun 2023, nilai yang didapatkan adalah 67,45 dengan predikat B. Nilai ini masih sangat jauh dari target tahun 2023 yaitu sebesar 81. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian mendapatkan 21 (dua puluh satu) rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya dan telah menindaklanjuti 11 (sebelas) rekomendasi dengan persentase tindak lanjut sebesar 52.38%.

LHE Deputy Bidang SINKA pada tahun 2024 mendapatkan nilai sebesar 67,85 dengan predikat B. Nilai ini masih sangat jauh dari target tahunan sebesar 85.

Beberapa kendala yang ditemui adalah perubahan instrumen kertas kerja dari Menpan RB sehingga evidence yang dibutuhkan belum seluruhnya terpenuhi. Rencana tindaklanjut untuk tahun selanjutnya yaitu menindak lanjuti hasil LHE dari Inspektorat.

IKU.14 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Deputy Bidang SINKA

Tabel 16 Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Deputy Bidang SINKA

Target		Realisasi	
2023	2024	2023	2024
99	99	99,07	99,12

Realisasi ini dihitung berdasarkan rata-rata dari jumlah realisasi anggaran masing-masing direktorat. Pada tahun 2023 realisasi IKU.14 sebesar 99,07% sudah di atas dari target tahunan yaitu 99%. Pada tahun 2024 realisasi IKU.14 sebesar 99,12% sudah di atas dari target tahunan yaitu 99% dan naik 0,5% dari realisasi tahun 2023. Realisasi tersebut dapat terlaksana dengan baik karena pencairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan.

Tindaklanjut untuk tahun 2024 untuk dapat meningkatkan realisasi IKU.14 ini antara lain Menyusun *timeline* untuk setiap kegiatan agar pelaksanaan kegiatan sesuai *timeline* yang telah ditentukan.

IKU.15 Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan BPK/Inspektorat

Tabel 17 Realisasi Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan BPK/Inspektorat

Target		Realisasi	
2023	2024	2023	2024
100%	100%	100%	100%

Realisasi IKU.15 ini dihitung berdasarkan rata-rata dari persentase tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan BPK/Inspektorat dari masing-masing direktorat. Realisasi IKU.15 ini selalu sebesar 100% sesuai dengan taget

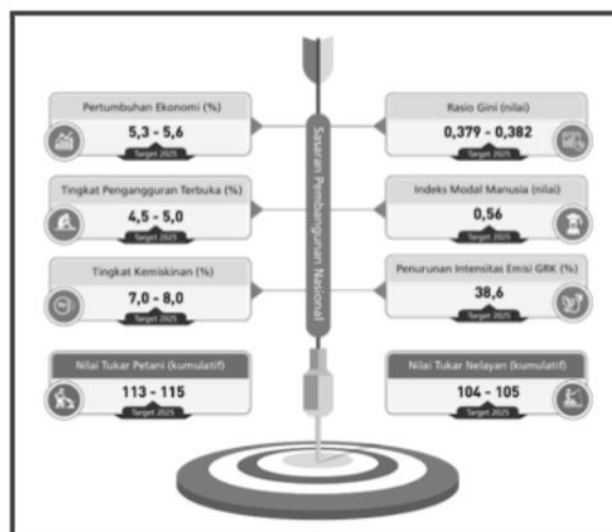
BAB III

RENCANA KERJA 2025

A. Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 secara nasional menekankan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah. "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut:



Gambar 2 Sasaran Pembangunan Tahun 2025

B. Program Prioritas Nasional 2024

Program Prioritas Nasional (PPN) merupakan program yang dirancang untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada Tahun 2025 program kerja BKN yang masuk ke dalam prioritas nasional terdapat 5 (lima) program, salah satunya yaitu terkait Database profile ASN. Program Prioritas Nasional ini bertujuan untuk membentuk database profile ASN yang memiliki data komprehensif dalam pengelolaan manajemen talenta. Target dari program ini sebanyak 1 layanan dengan pagu sebesar Rp 2.350.000.000.

Badan Kepegawaian Negara melalui Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian, memiliki kewenangan dalam mengelola data ASN, dan diberikan tanggung jawab melaksanakan salah satu Program Nasional untuk mewujudkan layanan data dan informasi ASN yang terintegrasi, akurat dan terkini. Program ini dijalankan dengan mengukur dan meningkatkan kualitas data ASN melalui kegiatan Sistem Informasi Manajemen ASN.

C. Indikator dan Target Kinerja

IKP.1 Tingkat Interoperabilitas Sistem Informasi ASN

Tabel 18 Target Tingkat Interoperabilitas Sistem Informasi ASN

Target 2025	
Renstra Deputi	Renja
20	20

Indikator ini menggambarkan Indikator ini menggambarkan Sistem Informasi Instansi Pemerintah yang telah terintegrasi dengan Database BKN untuk Data Riwayat Profil ASN pada platform Digital Manajemen ASN. Indikator ini diukur dengan jumlah persentase capaian dari setiap data riwayat profil ASN dibandingkan dengan jumlah target data riwayat profil ASN

Adapun data riwayat Profil ASN yang diukur yaitu:

1. Riwayat golongan
2. Riwayat Jabatan
3. Riwayat Pendidikan
4. Riwayat Diklat
5. Riwayat Kinerja
6. Riwayat Kompetensi
7. Riwayat Potensi
8. Riwayat Hukuman Disiplin
9. Riwayat Kenaikan Gaji Berkala
10. Riwayat Keluarga

Penentuan target pada tahun 2025 didasarkan pada beberapa hal diantaranya:

1. Dampak terhadap Pengambilan Keputusan: Tingkat Interoperabilitas yang maksimal akan meningkatkan kualitas Sistem Informasi dan berdampak pada juga pada kualitas data yang akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan oleh K/L/D/Stakeholders, yang pada akhirnya berkontribusi pada efektivitas kebijakan manajemen ASN.
2. Optimalisasi Digitalisasi dan Automasi: Dengan berkembangnya sistem digital, perlu adanya pengintegrasian agar dihasilkan data yang akurat dan valid.

IKP.2 Persentase Pemanfaatan Data Kepegawaian untuk Pengambilan Keputusan

Tabel 19 Target Persentase Pemanfaatan Data Kepegawaian untuk Pengambilan Keputusan

Target 2025	
Renstra Deputy	Renja
100	100

Indikator ini mengukur pemanfaatan data kepegawaian yang dihasilkan dari Sistem Informasi ASN (SIASN). Pemanfaatan data kepegawaian ini dilakukan berdasarkan

permohonan K/L/D/Stakeholders kepada BKN melalui kegiatan-kegiatan seperti penyajian data ASN dan pemadanan data ASN sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Indikator ini diukur dengan jumlah pemenuhan K/L/D/Stakeholders yang memanfaatkan data kepegawaian dibandingkan dengan jumlah permohonan data dikalikan seratus persen.

Penentuan target pada tahun 2025 didasarkan pada aspek-aspek diantaranya

1. Kepastian Layanan: Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan manajemen ASN, BKN berkewajiban untuk memastikan seluruh permohonan pemanfaatan data yang diajukan oleh K/L/D/Stakeholders dapat dipenuhi secara optimal.
2. Dampak terhadap Pengambilan Keputusan: Pemanfaatan data kepegawaian yang maksimal akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan oleh K/L/D/Stakeholders, yang pada akhirnya berkontribusi pada efektivitas kebijakan manajemen ASN.
3. Optimalisasi Digitalisasi dan Automasi: Dengan berkembangnya sistem digital, proses pemenuhan permohonan data semakin efisien dan minim kendala administratif, sehingga target 100% dapat dicapai secara realistis.

IKP.3 Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK yang Aman dan Handal

Tabel 20 Target Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK yang Aman dan Handal

Target 2025	
Renstra Deputi	Renja
99	99

Persentase tingkat ketersediaan infrastruktur menggambarkan pelaksanaan layanan operasional yang diberikan Direktorat Infrastruktur TI kepada seluruh pegawai di lingkungan BKN. Layanan tersebut antara lain layanan pusat komputasi, layanan kanal informasi dan komunikasi, serta layanan keamanan informasi.

Penentuan target untuk IKP ini berdasarkan rata-rata perhitungan capaian pusat komputasi, rata-rata penyediaan layanan internet selama satu tahun, dan rata-rata capaian layanan keamanan informasi. Target untuk IKP ini selalu sama setiap tahun.

IKP.4 Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital

Tabel 21 Realisasi Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital

Target 2025	
Renstra Deputi	Renja
30	30

Persentase pengelolaan arsip kepegawaian digital ini mengukur penyajian informasi dokumen kepegawaian digital dengan melakukan identifikasi keterisian dan kelengkapan dokumen kepegawaian digital pada sistem informasi dokumen kepegawaian. Jenis dokumen yang terdapat pada NIP terdiri dari:

1. Daftar Riwayat Hidup;
2. SK CPNS;
3. SK PNS;
4. Riwayat Pendidikan;
5. Surat Perintah Melaksanakan Tugas Pengangkatan Pertama (CPNS);
6. Riwayat Golongan/Kenaikan Pangkat;
7. Riwayat Jabatan;
8. Riwayat Pindah Instansi;
9. Riwayat Diklat/ Kursus.

Penentuan target pada tahun 2025 berdasarkan hal-hal berikut:

1. Mempertimbangkan kemampuan dan sumber daya yang tersedia
2. Kebutuhan atas informasi arsip kepegawaian untuk mendukung layanan kepegawaian secara optimal bagi ASN, Instansi Pusat dan Daerah
3. Mendukung sasaran strategis organisasi

IKP.5 Skor Evaluasi AKIP di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Tabel 22 Target Skor Evaluasi AKIP di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Target 2025	
Renstra Deputy	Renja
70	70

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilakukan untuk mengukur implementasi Sistem AKIP (SAKIP) dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN menggambarkan penilaian atas implementasi SAKIP di Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN yang dilakukan oleh Inspektorat BKN.

Realisasi indikator ini pada tahun 2024 sebesar 67,85 masih cukup jauh dari target tahun 2024 sebesar 85. Pada tahun 2025 IKU.5 ini ditargetkan mencapai nilai 70 disesuaikan dengan target IKU BKN yaitu Nilai Rata-rata Hasil Evaluasi Internal AKIP sebesar 72.

IKU.6 Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Tabel 23 Target Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Target 2025	
Renstra Deputy	Renja
100	100

Nilai reformasi birokrasi merupakan suatu ukuran yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN yang dilakukan oleh KemenPAN-RB sesuai dengan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 serta PermenPANRB No 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan KemenPAN-RB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023.

Pada tahun 2024 realisasi indikator ini sebesar 100%. Pengukuran dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara Rencana Aksi yang dilaksanakan oleh masing-masing Direktorat di lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN dengan Rencana Aksi yang ditargetkan.

Penentuan target kinerja pada indikator ini didasarkan pada target tahun-tahun sebelumnya yaitu 100%.

IKU.7 Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Tabel 24 Target Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Target 2025	
Renstra Deputy	Renja
99	99

Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN memperlihatkan seberapa besar serapan baik anggaran maupun fisik yang ada di Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN. Semakin besar serapan tersebut maka akan semakin efektif perencanaan yang sudah disusun dengan implementasi penggunaan anggaran.

Realisasi indikator ini pada tahun 2024 sebesar 99,12% sudah melebihi target tahunan sebesar 99%. Pada tahun 2025 indikator ini ditargetkan sebesar 99%.

Penentuan target kinerja pada indikator ini didasarkan pada target tahun-tahun sebelumnya yaitu 99%.

IKU.8 Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Tabel 25 Target Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Target 2025	
Renstra Deputy	Renja
100	100

Persentase tindak lanjut temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat merupakan upaya tindak lanjut/penyelesaian yang dilakukan oleh Deputy Bidang Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN terhadap temuan hasil audit yang dilakukan oleh BPK/Inspektorat.

Realisasi indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% sudah mencapai target tahun 2024 sebesar 100%. Pada tahun 2025 indikator ini ditargetkan sebesar 100%. Penentuan target kinerja pada indikator ini didasarkan pada target tahun-tahun sebelumnya yaitu 100%.

D. Rencana Anggaran

Sebagai upaya dalam penyelarasan antara perencanaan kinerja dengan anggaran maka berikut data anggaran yang digunakan dalam rangka mewujudkan terealisasinya sasaran strategis Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN selama tahun 2025.

No.	Sasaran Program	Anggaran
1.	Terwujudnya Digitalisasi Manajemen ASN yang Interoperabel	Rp 39,945,235,000
2.	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja	Rp 58,070,000
3.	Governansi BKN yang Digital, Berbasis Bukti dan Akuntabel	Rp 7,500,000

BAB IV. PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN tahun 2025-2029, yang akan dilaksanakan oleh Direktorat di lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran yang mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen ini merupakan acuan bagi unit eselon I di lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam rangka memenuhi sasaran kinerja organisasi, maka perlu diambil langkah-langkah yang optimal melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih efektif berdasarkan skala prioritas didukung dengan tertib hukum, administrasi, dan keuangan

Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi
Manajemen ASN